Laporan Keuangan
Pengadilan Agama Watampone

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2020

Jl. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A
Watampone

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Watampone adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Pengadilan Agama Watampone yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Watampone. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Watampone, 6 Juli 2020
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Watampone

H.A.Fajar Sawerilongi, SE.,M.Si.
NIP. 197412142006041002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL v

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB vi

RINGKASAN vii

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ix

NERACA x

LAPORAN OPERASIONAL xii

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 12

A. PENJELASAN UMUM 12

A.1. Dasar Hukum 12

A.3.Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 14

5.Dasar Pengukuran 15

A.6.Kebijakan Akuntansi 15

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 21

B.1 Pendapatan 22

B.2 Belanja Pegawai 25

B.3 Belanja Barang 25

B.4 Belanja Modal 26

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 20

C.1 Persediaan 20

C.2 Tanah 20

C.3 Peralatan dan Mesin 29

C.4 Gedung dan Bangunan 29

C.5 Jaringan 30
C.6 Aset Tetap Lainnya 31
C.17 Aset Lain–Lain 31
C.18 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 32
C.19 Utang kepada Pihak Ketiga 32
C.21 Ekuitas 32
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 60
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 60
D.2 Beban Pegawai 60
D.3 Beban Persediaan 61
D.4 Beban Barang dan Jasa 61
D.5.Beban Pemeliharaan 62
D.6Beban Perjalanan Dinas 62
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi 63
D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional 63
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 65
E.1 Ekuitas Awal 65
E.2Defisit LO 65
E.3Selisih Revaluasi Aset Tetap 65
E.4Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 65
E.5 Transaksi Antar Entitas 65
E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) 66
E.5.2 Transfer Masuk 66
E.6 Ekuitas Akhir 66
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA 68
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca 68
F.2. Pengungkapan Lain-Lain 68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 22
Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP TA 2019 dan TA 2018 23
Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2020 23
Tabel 4. PerbandinganRealisasiBelanja TA 2019 dan TA 2018 24
Tabel 5. PerbandinganBelanjaPegawai TA 2019 dan TA 2018 25
Tabel 6. PerbandinganBelanja Barang TA 2019 dan TA 2018 25
Tabel 7. PerbandinganBelanjaModalTA 2019 dan TA 2018 26
Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan MesinTA 2019 dan TA 2018 27
Tabel 9. RincianPersediaan 20
Tabel 10. Rincian Saldo Tanah Per 30 Juni 2020 26
Tabel 12. RincianAkumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 32
Tabel 13. Perbandingan Rincian Pendapatan 30 Juni 2020 dan 60
Tabel 14. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2020 dan 61
Tabel 15. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2020 dan 61
Tabel 16. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2018 62
Tabel 17. Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2018 62
Tabel 18. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2018 62
Tabel 19. PerbandinganRincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 63
Tabel 21. Rincian Kegiatan Non Operasional30 Juni 2020 dan 63

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
Jl. Lak. Yos Sudarso No. 49 A Watampone
Telp. 0481-21018 Fax. 0481-21018 e-mail : watampone.pta-makassarkota.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone Semester I tahun 2020 (*Audited*) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 30 Juni 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Watampone, 6 Juli 2020
Kuasa Pengguna Anggaran

H.A.FAJAR SJAM SAWERILONGI, SE.,M.SI
NIP.197412142006041002

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone Tahun 2019 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2020. Realisasi Pendapatan Negara Semester I TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp7.007.249,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp14.672.000,00 atau mencapai 47,76 persen. Realisasi Belanja Negara Semester I TA 2020 adalah sebesar Rp6.398.288.216,00 atau mencapai 45,59 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp14.035.709,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Semester I Tahun 2020. Nilai Aset per Semester I Tahun 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp11.754.232.237,00, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp24.496.500; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp11.666.069.557,00; Utang Jangka pendek (utang kepada Pihak ketiga) sebesar Rp0,-; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp62.666.180,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp11.730.232.237,00 dan Rp11.754.232.237,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp7.007.177,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp6.367.015.241,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(6.360.008.064,00). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.192.622,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp(6.358.815.442,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp11.697.766.712,00 dikurangi defisit-LO sebesar Rp(6.358.815.442,00), kemudian ditambah dengan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp0,00 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp6.391.280.967,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2020 adalah senilai Rp11.730.232.237,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TA 2020 DAN TA 2019

URAIAN	CATATAN	TA 2020			TA 2019		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN							
1. Pendapatan	B.1	14.672.000,00	7.007.249,00	47,76	-	4.745.595,00	#DIV/0!
Jumlah Pendapatan		**14.672.000,00**	**7.007.249,00**	**47,76**	**-**	**4.745.595,00**	**#DIV/0!**
BELANJA							
1. Belanja Pegawai	B.2	12.451.762.000,00	5.429.952.772,00	43,61	11.877.915.000,00	6.042.837.834,00	50,87
2. Belanja Barang	B.3	1.388.947.000,00	798.585.444,00	57,50	863.519.000,00	293.440.059,00	33,98
3. Belanja Modal	B.4	195.000.000,00	169.750.000,00	87,05	173.000.000,00	4.000.000,00	2,31
Jumlah Belanja		**14.035.709.000,00**	**6.398.288.216,00**	**45,59**	**12.914.434.000,00**	**6.340.277.893,00**	**49,09**

NERACA

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
NERACA
PER 30 Juni 2020 DAN 2019

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		30 Juni 2020	31 DESEMBER 2019
1	2	3	4
ASET			
Aset Lancar	**C**		
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid	C. 1	-	-
Piutang Bukan Pajak	C. 2	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C. 3	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto		-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 4	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 5	-	-
Kas di Bendahara Pengaluaran		24.000.000,00	-
Persediaan	C. 6	1.496.500,00	873.150,00
Jumlah Aset Lancar		**25.496.500,00**	**873.150,00**
Aset Tetap			
Tanah	C. 7	5.238.828.000,00	5.238.828.000,00
Peralatan dan Mesin	C. 8	2.294.973.218,00	2.294.973.218,00
Gedung dan Bangunan	C. 9	6.278.310.000,00	6.108.560.000,00
Jalan. Irigasi dan Jaringan	C. 10	19.988.100,00	19.988.100,00
Aset Tetap Lainnya	C. 11	14.997.470,00	14.997.470,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 12	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 13	*(2.181.027.231,00)*	*(1.997.040.710,00)*
Jumlah Aset Tetap		**11.666.069.557,00**	**11.680.306.078,00**
Piutang Tagihan TP/TGR	C. 14	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C. 15	-	-
Tagihan TP/TGR (*Netto)*		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		**-**	**-**
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C. 16	-	-
Aset Lain-Lain	C. 17	120.263.000,00	120.263.000,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 18	*(57.596.820,00)*	*(56.726.456,00)*
Jumlah Aset Lainnya		**62.666.180,00**	**63.536.544,00**
JUMLAH ASET		**11.754.232.237,00**	**11.744.715.772,00**
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek		24.000.000,00	-
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 19	-	46.949.060,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C. 20	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**24.000.000,00**	**46.949.060,00**
JUMLAH KEWAJIBAN		**24.000.000,00**	**46.949.060,00**
EKUITAS			
Ekuitas	C. 21	11.730.232.237,00	11.697.766.712,00
JUMLAH EKUITAS		**11.730.232.237,00**	**11.697.766.712,00**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		**11.754.232.237,00**	**11.744.715.772,00**

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
LAPORAN OPERASIONAL
TA 2019 DAN TA 2018

URAIAN	CATATAN	TA 2020	TA 2019
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA		7.007.177	4.745.544
PENDAPATAN HIBAH			
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D. 1	7.007.177	4.745.544
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	5.392.910.230	6.037.000.101
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	14.469.300	9.977.750
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	490.128.241	203.544.351
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	261.726.174	37.634.600
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	22.924.411	31.731.100
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	184.856.885	158.013.903
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	D. 8	-	-
JUMLAH BEBAN		6.367.015.241	6.477.901.805
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(6.360.008.064)	(6.473.156.261)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2.406.572	14.051
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.213.950	20.500
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.192.622	(6.449)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 9	1.192.622	(6.449)
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO		(6.358.815.442)	(6.473.162.710)

LAPORAN

PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
30 Juni 2020 DAN 2019

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2020	30 JUNI 2019
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	11.697.766.712,00	11.736.484.669,00
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	(6.358.815.442,00)	(6.473.162.710)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI			-
EKKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		-	-
KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR			
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3		-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 4	-	-
Koreksi lain-lain	E. 5	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 6	6.391.280.967,00	6.335.532.298
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		32.465.525,00	(137.630.412)
EKUITAS AKHIR	E. 7	***11.730.232.237,00***	***11.598.854.257***

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Watampone

Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Watampone

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone

Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015-2019 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Agama Watampone Tahun 2010-2014 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015-2019.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Agama Watampone Mahkamah Agung RI menetapkan visi sebagai berikut :

"MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG".

Visi Pengadilan Agama Watampone mewujudkan :

a. Terpenuhinya sumber daya manusia Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan dibawahnya yang profesional dan berintegritas;
b. Terpenuhinya kebutuhan anggaran dan sarana prasarana peradilan yang memadai;
c. Terlaksananya pelayanan publik yang prima oleh Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Misi Pengadilan Agama Watampone:

Untuk mencapai visi Pengadilan Agama Watampone yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan kuantitas sumber daya manusia;
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan public;
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran;
5. Meningkatkan kelembagaan/ organisasi peradilan yang efektif dan efisien;
6. Meningkatkan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan transparan;
7. Meningkatkan sistem informasi yang handal dan professional;
8. Meningkatkan ketatalaksanaan yang berkualitas;
9. Meningkatkan penatausahaan aset Negara;
10. Meningkatkan pelayanan adaministrasi.

Tujuan

Terkoordinasinya pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 (*Audited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Watampone. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akrual

Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Watampone menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

5.Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Watampone dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan akuntansi

6.Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan KeuanganTahun 2019(*Audited*)telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Watampone yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Watampone.Disamping itu, dalam

penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN);
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan-LRAdisajikan menurutklasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan persekot gaji;
  - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
  - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatandisajikan menurutklasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperolehpembayarannya kembali oleh pemerintah;
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN;
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan

oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca;
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal;
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan

piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA;
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
  - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun;
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar;
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya;
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap;
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah;
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat;
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan. Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya;
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisas;
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi;
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
  a. Kewajiban Jangka Pendek

     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

     Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka,Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  b. Kewajiban Jangka Panjang

     Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Watampone telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Uraian	30 Juni 2020	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain	14.672.000	14.672.000
Jumlah Pendapatan	14.672.000	14.672.000
Belanja		
Belanja Pegawai	12.451.762.000	12.451.762.000
Belanja Barang	1.388.947.000	1.388.947.000
Belanja Modal	195.000.000	195.000.000
Jumlah Belanja	14.035.709.000	14.035.709.000

Realisasi Pendapatan Rp7.007.249,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp7.007.249,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp14.672.000,00. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	2020		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	14.672.000,00	7.007.177,00	47
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	72,00	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	0
Jumlah Pendapatan Bruto		**14.672.000,00**	**7.007.249,00**	**47**
Pengembalian		**-**	**-**	**0**
Jumlah Pendapatan Netto		**14.672.000,00**	**7.007.249,00**	**47**

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp2.261.654,00 atau 47,65 persen dibandingkan realisasi periode 30 Juni

2020. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan dalam Pendapatan sewa tanah dan bangunan (Rumah Dinas).

Perbandingan realisasi PNBP 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP TA 2020 dan TA 2019

(dalam rupiah)

KODE	Uraian	TA 2020	TA 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7.007.177,00	4.745.544,00	2.261.633,00	47,66
425991	Penerimaan kembali Belanja TA Yang Lalu	72,00	51,00	21,00	41,18
Jumlah Pendapatan Netto		**7.007.249,00**	**4.745.595,00**	**2.261.654,00**	**47,66**

Belanja

Realisasi Belanja Negara Rp6.398.288.216,00

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Watampone pada periode 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp6.398.288.216,00 atau 45,59% dari anggaran belanja sebesar Rp14.035.709,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 30 Juni 2020 tersaji sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2020

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	12.451.762.000,00	5.429.952.772,00	43,61
52	Belanja Barang	1.388.947.000,00	798.585.444,00	57,50
53	Belanja Modal	195.000.000,00	169.750.000,00	87,05
Jumlah Belanja Bruto		**14.035.709.000,00**	**6.398.288.216,00**	**45,59**
Pengembalian Belanja		-	-	0,00
Jumlah Belanja Netto		**14.035.709.000,00**	**6.398.288.216,00**	**45,59**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Realisasi belanja periode 30 Juni 2020 secara umum mengalami kenaikan sebesar Rp.58.010.323,00 atau sebesar 0,91% dibandingkan realisasi periode 30 Juni 2020. Hal ini disebabkan adanya realisasi belanja modal berupa Penambahan Daya Listrik pada Semseter I Tahun 2020.

Perbandingan realisasi belanja periode 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. PerbandinganRealisasiBelanja TA 2020 dan TA 2019

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		Smt I TA 2020	Smt. I TA 2019	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	5.429.952.772,00	6.042.837.834,00	(612.885.062,00)	(10,14)
52	Belanja Barang	798.585.444,00	293.440.059,00	505.145.385,00	172,15
53	Belanja Modal	169.750.000,00	4.000.000,00	165.750.000,00	4.143,75
Jumlah Belanja Netto		**6.398.288.216,00**	**6.340.277.893,00**	**58.010.323,00**	**0,91**

Belanja Pegawai Rp5.429.952.772,00

B.2 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.429.952.772,00 dan Rp6.042.837.834,00. Realisasi Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp612.885.062,00,00 atau 10,14% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2020. Hal ini disebabkan karena pada peroide ini Ketua, Wakil Ketua dan Hakim tidak memperoleh Tunjangan Hari Raya.

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Belanja PegawaiSemester I TA 2020 dan TA 2019

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2020	TA 2019	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.417.713.660,00	1.536.252.980,00	(118.539.320,00)	(7,72)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.272,00	21.289,00	(3.017,00)	(14,17)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	106.710.840,00	115.265.460,00	(8.554.620,00)	(7,42)
Belanja Tunj. Anak PNS	25.702.054,00	31.997.130,00	(6.295.076,00)	(19,67)
Belanja Tunj. Struktural PNS	20.160.000,00	20.160.000,00	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.969.520.000,00	3.378.340.000,00	(408.820.000,00)	(12,10)
Belanja Tunj. PPh PNS	436.386.424,00	515.603.156,00	(79.216.732,00)	(15,36)
Belanja Tunj. Beras PNS	55.618.560,00	58.225.680,00	(2.607.120,00)	(4,48)
Belanja Uang Makan PNS	187.578.000,00	177.040.000,00	10.538.000,00	5,95
Belanja Tunjangan Umum PNS	1.295.000,00	2.035.000,00	(740.000,00)	(36,36)
Belanja Pegawai (Tunjangan Kemahalan Haim)	209.250.000,00	207.900.000,00	1.350.000,00	0,65
Realisasi Belanja Bruto	**5.429.952.810,00**	**6.042.840.695,00**	**(612.887.885,00)**	**(10,14)**
Pengembalian	**(38,00)**	**(2.861,00)**	**2.823,00**	**(98,67)**
Realisasi Belanja Netto	**5.429.952.772,00**	**6.042.837.834,00**	**(612.885.062,00)**	**(10,14)**

B.3 Belanja Barang

Belanja Barang Rp798.585.444,00

Realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp798.585.444,00 dan Rp293.440.059,00. Realisasi Belanja Barang mengalami kenaikan sebesarRp505.145.385,00 atau 172,15% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2020. Hal ini disebabkan adanya realisasi belanja barang yang lebih tinggi pada semester I Tahun 2020 .

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2020 dan TA 2019

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2020	TA 2018	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	296.991.486,00	172.031.000,00	124.960.486,00	72,64
Belanja Barang Non Operasional	-	9.265.000,00	(9.265.000,00)	(100,00)
Belanja Barang Persediaan	18.368.500,00	9.972.500,00	8.396.000,00	84,19
Belanja Jasa	203.043.273,00	42.595.859,00	160.447.414,00	376,67
Belanja Pemeliharaan	257.257.774,00	37.109.600,00	220.148.174,00	593,24
Belanja Perjalanan Dinas	22.924.411,00	22.466.100,00	458.311,00	2,04
Realisasi Belanja Bruto	**798.585.444,00**	**293.440.059,00**	**505.145.385,00**	**172,15**
Pengembalian	**-**	**-**	**-**	**-**
Realisasi Belanja Netto	**798.585.444,00**	**293.440.059,00**	**505.145.385,00**	**172,15**

Belanja Modal Rp169.750.000,00

B.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp169.750.000,00 dan Rp4.000.000,00. Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan sebesarRp165.750.000,00 atau 4.143,75% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2019. Hal ini disebabkan adanya Realisai Belanja Modal berupa Penambahan Daya Listrik.

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal Semester I TA 2020 dan TA 2019

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2020	TA 2019	(Rp)	%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	169.750.000,00	-	169.750.000,00	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(100,00)
Realisasi Belanja Bruto	**169.750.000,00**	**4.000.000,00**	**165.750.000,00**	**4.143,75**
Pengembalian	**-**	**-**	**-**	**-**

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp4.000.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar Rp4.000.000,00 atau 0% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Juni 2019. Hal ini disebabkan karena Belanja Modal Peralatan dan Mesin belum terealisasi pada Semester I tahun 2020.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2020 dan TA 2019

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2020	TA 2019	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(100,00)
Realisasi Belanja Bruto	**-**	**4.000.000,00**	**(4.000.000,00)**	**(100,00)**
Pengembalian	**-**	**-**	**-**	**-**

B.4.2 Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan periode 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp169.750.000,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami Kenaikan sebesar Rp169.750.000,00 atau 100% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan periode 31 Juni 2019. Hal ini disebabkan karena adanya Belanja Modal Penambahan Daya Listrik Pada Tahun 2020 dan terealisasi pada Semester I tahun 2020.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan MesinTA 2019 dan TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2020	TA 2019	(Rp)	%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	169.750.000,00	-	169.750.000,00	#DIV/0!
Realisasi Belanja Bruto	**169.750.000,00**	**-**	**169.750.000,00**	**#DIV/0!**
Pengembalian	**-**	**-**	**-**	**-**
Realisasi Belanja Netto	**169.750.000,00**	**-**	**169.750.000,00**	**#DIV/0!**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Persediaan

Rp1.496.500,00

C.1 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp1.496.500,00 dan Rp873.150,00, terjadi kenaikan sebesar Rp623.350,00 atau 71,39%.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 10. RincianPersediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2019	Mutasi	30 Juni 2020
1	Barang Konsumsi	873.150,00	623.350,00	1.496.500,00
Jumlah		**873.150,00**	**623.350,00**	**1.496.500,00**

Nilai persediaan diatas berdasarkan Berita Acara Opname Fisik Persediaan Nomor: W20-A2/1084.a /OT.00/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020.

Tanah

Rp5.238.828.000,00

C.2 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Watamponeper 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.238.828.000,00 dan Rp5.238.828.000,00.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	**5.238.828.000,00**
Mutasi tambah:	**0,00**
Mutasi kurang:	**0,00**
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 30 Juni 2020	**5.238.828.000,00**

Tabel 11. Rincian Saldo Tanah Per 30 Juni 2020

JENIS BMN	NUP	TANAH MILIK SENDIRI			LUAS TANAH (m2)	NILAI PEROLEHAN
		NO DAN TANGGAL SERTIFIKAT	ALAMAT LOKASI TANAH	KEPEMILIKAN ATAS NAMA		
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	Nomor 13, taanggal 10 Nopember 2014	Jl. Lak. Yos Sudarso No. 49 A Watapone	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI	3.424	1.122.240.000,00
Jumlah Halaman I					**3.424**	**1.122.240.000,00**

JENIS BMN	NUP	TANAH MILIK SENDIRI			LUAS TANAH (m2)	NILAI PEROLEHAN
		NO DAN TANGGAL SERTIFIKAT	ALAMAT LOKASI TANAH	KEPEMILIKAN ATAS NAMA		
Jumlah Halaman I					**3.424**	**1.122.240.000,00**
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	Nomor 14, tanggal 22 Desember 1982	Jl. Lak. Yos Sudarso No. 20 Watampone	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI	1.308	460.000,00
Jumlah Halaman II					**1.308**	**460.000,00**
Jumlah Halaman I dan II					**4.732**	**1.122.700.000,00**

Peralatan dan Mesin Rp2.294.973.218,00

C.3 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesinper 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2018 adalah Rp2.294.973.218,00 dan Rp2.294.973.218,00, terjadi kenaikan sebesar Rp343.902.190,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	2.294.973.218
Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Pengembangan Melalui KDP	-
Reklasifikasi Masuk	-
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	-
Transfer Masuk	-
Perolehan Tindak Lanjut Normalisasi	-
Jumlah Mutasi Tambah	**-**
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Normalisasi BMN	-
Jumlah Mutasi Kurang	**-**
Jumlah Mutasi	**-**
Saldo per 30 Juni 2020	2.294.973.218
Akumulasi Penyusutan	(1.803.431.528)
Nilai Buku	**491.541.690**

Tidak terdapat mutasi tambah ataupun mutasi kurang pada periode ini.

Gedung dan Bangunan Rp.6.278.310.000,00

C.4 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunanper 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp6.278.310.000,00 dan Rp*6.108.560.000*,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	6.108.560.000
Pengembangan	169.750.000
Pengembangan Melalui KDP	-
Reklasifikasi Masuk	-
Perolehan Tindak Lanjut Normalisasi	-
Jumlah Mutasi Tambah	**169.750.000**
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Penghentian Penggunaan BMN	-
Jumlah Mutasi Kurang	**-**
Jumlah Mutasi	**169.750.000**
Saldo per 31 Desember 2019	6.278.310.000
Akumulasi Penyusutan	(375.347.044)
Nilai Buku	**5.902.962.956**

Mutasi tambah yang terjadi pada Pengadilan Agama Watampone disebabkan adanya penambahan Daya Listrik dari 13.000 watt menjadi

C.5 Jaringan

Jaringan Rp19.988.100,00

Saldo Jaringan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp19.988.100,00dan Rp19.988.100,00.

Mutasi nilai Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	19.988.100
Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Pengembangan melalui KDP	-
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	-
Reklasifikasi Masuk	-
Jumlah Mutasi Tambah	**-**
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Jumlah Mutasi Kurang	**-**
Jumlah Mutasi	**-**
Saldo per 30 Juni 2020	19.988.100
Akumulasi Penyusutan	(2.248.659)
Nilai Buku	**17.739.441**

Tidak terdapat mutasi tambah ataupun mutasi kurang pada asset Jaringan.

Aset Tetap LainnyaRp14.997.470,00

C.6 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnyaper 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp14.997.470,00 dan Rp14.997.470,00.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	14.997.470
Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Pengembangan Melalui KDP	-
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	-
Reklasifikasi Masuk	-
Jumlah Mutasi Tambah	**-**
Transfer Keluar	-
Jumlah Mutasi Kurang	**-**
Jumlah Mutasi	**-**
Saldo per 30 Juni 2020	14.997.470
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	**14.997.470**

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya yang terjadi pada Pengadilan Agama Watampone

Aset Lain-Lain Rp120.263.000,00

C.17 Aset Lain–Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp120.263.000,00 dan Rp120.263.000,00.

Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	120.263.000,00
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	-
Penghapusan BMN yang dihentikan	-
Jumlah Mutasi Kurang	**-**
Jumlah Mutasi	**-**
Saldo per 30 Juni 2020	120.263.000,00
Akumulasi Penyusutan	(57.596.820,00)
Nilai Buku	**62.666.180,00**

Tidak terdapat mutasi tambah ataupun mutasi kurang

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp(57.596.820,00)

C.18 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp*(57.596.820,00)* dan Rp(56.726.456,00), terjadi kenaikan sebesar Rp(870.364,00) atau 1,53%.

Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya30 Juni 2020 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 12. RincianAkumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Lain-Lain	120.263.000,00	(57.596.820,00)	62.666.180,00
Jumlah		**120.263.000,00**	**(57.596.820,00)**	**62.666.180,00**

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp0,00

C.19 Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp26.949.060,00. Tidak terdapat Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	-	Kekurangan Gaji, Tunjangan Khusus Kinerja, dan Uang Makan yang belum dibayarkan di tahun 2019
2	Belanja Barang yang masih harus dibayar	-	Kekurangan biaya Internet, listrik, air, dan telepon yang belum dibayarkan di tahun 2019
Jumlah		-	

Ekuitas Rp11.730.232.237,00

C.20 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp11.730.232.237,00 dan Rp11.697.766.712,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP

Rp7.007.177,00

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp*7.007.177*,00 dan Rp4.745.544,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 13. Perbandingan Rincian Pendapatan 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan PNBP Lainnya				
Pendapatan dari pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan				
1	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	7.007.177,00	4.745.544,00	47,66
Jumlah Pendapatan BMN serta Pendapatan dari Penjualan		7.007.177,00	4.745.544,00	47,66
Pendapatan Lain-Lain				
1	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0,00	0,00	#DIV/0!
Jumlah Pendapatan Lain-Lain		0,00	0,00	#DIV/0!
Total		**7.007.177,00**	**4.745.544,00**	47,66

Pendapatan dari pengelolaan BMN berasal dari sewa Rumah Dinas Pengadilan Agama Watampone Jl. Lak. Yos Sudarso No. 20 Watampone dan gedung dan bangunan pada Gedung Pengadilan Agama Watampone, Jl. Lak. Yos Sudarso No. 49 A Watampone.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai

Rp5.392.910.230,00

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2020 dan 20 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.392.910.230,00 dan Rp6.037.000.101,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 14. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA. 2020	TA. 2019	Naik (Turun) %
1	Beban Gaji Pokok PNS	1.417.294.960,00	1.534.859.180,00	(7,66)
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	18.222,00	18.385,00	(0,89)
3	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	106.686.890,00	115.126.080,00	(7,33)
4	Beban Tunj. Anak PNS	25.692.474,00	31.941.378,00	(19,56)
5	Beban Tunj. Struktural PNS	20.160.000,00	20.160.000,00	-
6	Beban Tunj. Fungsional PNS	2.969.520.000,00	3.374.740.000,00	(12,01)
7	Beban Tunj. PPh PNS	404.153.124,00	514.954.398,00	(21,52)
8	Beban Tunj. Beras PNS	55.618.560,00	58.225.680,00	(4,48)
9	Beban Uang Makan PNS	183.221.000,00	177.040.000,00	3,49
10	Beban Tunjangan Umum PNS	1.295.000,00	2.035.000,00	(36,36)
11	Beban Tunjanga Kemahalan Hakim	209.250.000,00	207.900.000,00	0,65
Total		**5.392.910.230,00**	**6.037.000.101,00**	**(10,67)**

Beban Persediaan Rp14.469.300,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp14.469.300,00 dan Rp9.977.750,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 15. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	14.469.300,00	9.977.750,00	45,02
2	Beban Persediaan Lainnya	0,00	0,00	-
Total		**14.469.300,00**	**9.977.750,00**	**45,02**

Beban Barang dan Jasa Rp490.128.241,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp490.128.241,00 dan Rp203.544.351,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Semester I Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	247.278.786,00	127.199.000,00	94,40
2	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	586.000,00	463.500,00	26,43
3	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	24.150.000,00	24.150.000,00	-
4	Beban Barang Operasional Lainnya	20.338.700,00	15.909.000,00	27,84
5	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	2.957.500,00	0,00	#DIV/0!
6	Beban Langganan Listrik	35.890.649,00	30.617.682,00	17,22
7	Beban Langganan Telepon	312.906,00	598.669,00	(47,73)
8	Beban Langganan Air	4.173.700,00	4.606.500,00	(9,40)
9	Beban Sewa	154.440.000,00	0,00	#DIV/0!
Total		**490.128.241,00**	**203.544.351,00**	**140,80**

D.5.Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp261.726.400,00

Beban pemeliharaanpada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp261.726.174,00 dan Rp37.634.600,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	131.423.000,00	7.416.000,00	1.672,15
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	78.300.000,00	0,00	#DIV/0!
3	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	47.534.774,00	29.693.600,00	60,08
4	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	4.468.400,00	525.000,00	751,12
Total		**261.726.174,00**	**37.634.600,00**	**595,44**

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp22.924.411,00

Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp22.924.411,00 dan Rp31.731.100,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

(dalam Rupiah)

0

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	22.924.411,00	31.731.100,00	(27,75)
Total		**22.924.411,00**	**31.731.100,00**	**(27,75)**

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp184.856.885,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp184.856.885,00 dan Rp158.013.903,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. PerbandinganRincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2010	TA 2019	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	106.856.594,00	82.276.946,00	29,87
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	76.880.076,00	74.616.742,00	3,03
3	Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	249.851,00	249.851,00	-
4	Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidag digunakan dala Operasional Pemerintah	870.364,00	870.364,00	-
Jumlah Penyusutan		**184.856.885,00**	**158.013.903,00**	**16,99**
		0,00	0,00	-
Jumlah Amortisasi		**0,00**	**0,00**	**-**
1	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	0,00	-
Total		**184.856.885,00**	**158.013.903,00**	**16,99**

D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp1.192.622,00

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
1	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	72,00	51,00	41,18
2	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	2.406.500,00	14.000,00	17.089,29
3	Beban Penyesuaian nilai Persediaan	(1.213.950,00)	(20.500,00)	5.821,71
Total		**1.192.622,00**	**(6.449,00)**	**(18.593,13)**

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Rp11.697.766.712,00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 20198 adalah masing-masing sebesar Rp11.697.766.712,00 dan Rp11.736.484.669,00.

E.2Defisit LO

Defisit LO Rp(6.358.815.442,00)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah defisit sebesar Rp(6.358.815.442,00) dan Rp(6.473.162.710,00). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp5.465.652.780,00.

E.4Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp,00

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp0,00 danRp0,00.

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp6.391.280.967,00

Nilai transaksi antar ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.391.280.967,00 dan Rp6.335.532.298,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.398.288.216,00
Diterima dari Entitas Lain	(7.007.249,00)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	170.902.190,00
	6.562.183.157,00

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2020, DDEL sebesar (Rp7.007.249,00) sedangkan DKEL sebesar Rp6.398.288.216,00.

E.5.2 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN.

Rincian Transfer Masuk terlampir dalam Calbmn.

E.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp11.730.232.237,00

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp11.730.232.237,00 dan Rp11.598.854.257,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal necara per 30 Juni 2020 pada Pengadilan Agama Watampone yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 30 Juni 2020.

F.2. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watamponeuntuk periode yang berakhir 30 Juni 2020 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1. Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Watampone adalah:
    1. BRI Cab. Watampone A/C 0111-01-000120-30-6 a.n. Bpg 055 Pengadilan Agama Watampone yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.0,- (Nol rupiah)
    2. BRI A/C 00000111-01-001515-30-0 a.n. Bpg 055 Pengadilan Agama Watampone yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
    3. BRI A/C 0111-01-002396-30-1 a.n. RPL 055 PA WATAMPONE yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.278.955.000 (Dua ratus Tujuh puluh Delapan ribu Sembilan ratus Lima puluh Lima ribu rupiah)

2. Revisi DIPA

    DIPA pada Pengadilan Agama Watampone Tahun Anggaran 2020 bernomor : DIPA-005.01-1.307509/2020 tanggal 06 Desember 2018 berjumlah sebesar Rp12.775.837.000,00 (Dua belas Milyar Tujuh ratus Tujuh puluh Lima juta Delapan ratus Tiga puluh Tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

    a. DIPA Awal

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.01.01		
1064.994.001	511111	2,300,000,000
	511119	39,000
	511121	198,669,000
	511122	50,333,000
	511123	40,320,000

	511124	7,100,000,000
	511125	1,625,911,000
	511126	121,862,000
	511129	510,312,000
	511151	12,916,000
	511157	491,400,000
1064.994.002	521111	566,615,000
	521114	970,000
	521115	57,960,000
	521119	20,900,000
	521811	24,500,000
	522111	91,440,000
	522112	2,400,000
	522113	11,448,000
	522141	234,000,000
	523111	140,320,000
	523119	78,300,000
	523121	92,611,000
	524111	51,340,000
	524119	16,143,000
1071.951	532111	25,000,000
	533121	170,000,000
Total		**14,035,709,000**

b. Revisi DIPA 1 (Tanggal 13 Pebruari 2020)

Tidak terdapat perubahan nilai pagu pada Revisi DIPA 1.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.01.01		
1064.994.001	511111	2,300,000,000
	511119	39,000
	511121	198,669,000
	511122	50,333,000
	511123	40,320,000
	511124	7,100,000,000
	511125	1,625,911,000
	511126	121,862,000
	511129	510,312,000

	511151	12,916,000
	511157	491,400,000
1064.994.002	521111	566,615,000
	521114	970,000
	521115	57,960,000
	521119	20,900,000
	521811	24,500,000
	522111	91,440,000
	522112	2,400,000
	522113	11,448,000
	522141	234,000,000
	523111	140,320,000
	523119	78,300,000
	523121	92,611,000
	524111	51,340,000
	524119	16,143,000
1071.951	532111	25,000,000
	533121	170,000,000
Total		**14,035,709,000**

3. Penjelasan terkait Jurnal Bantu pada menu Jurnal Penyesuaian aplikasi SAIBA 2019.

   Jurnal Penyesuaian

   - Pada tanggal 2 Januari 2020 merupakan jurnal balik dari penyajian jurnal akrual Tahun Anggaran Yang Lalu;

4. Tidak Terdapat perbaikan Transaksi SPM/SP2D/SSPB/SSBP

   Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung RI., Nomor 65/PA/SK/XII/2019 Tanggal : 2 Desember Tahun 2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya maka Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Watampone adalah Sekretaris Pengadilan Agama Watampone yaitu :

   H.A.Fajar Sjam Sawerilongi, SE.,M.Si

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Watampone Nomor : W20-A2/002/KU.00/SK/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji dan Penandatangan SPM dan Staf Pengelola Keuangan :

Pejabat Pembuat Komitmen	: Nurhidayah, S.Ag
PejabatPenandatangan/Penguji SPM	: Maftukhah Mustafa, S.Kom
Bendahara	: Heriawati, SH

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

LAMPIRAN A.1

TABEL PENYUSUTAN TA. 2019

Tanggal : 13-09-2020
Halaman : 1
Kode Lap. : LPSGKS

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL, EKSTRAKOMPTABEL DAN AMORTISASI
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA UAKPB : 005.01.19.307509 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 30 JUNI 2020						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	PERALATAN DAN MESIN		553	2,307,163,218	1,708,764,934	106,856,594	0	1,815,621,528	491,541,690
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Unit	10	455,024,828	455,024,828	0	0	455,024,828	0
3.05.01	ALAT KANTOR	Buah	94	235,228,200	194,569,380	13,279,820	0	207,849,200	27,379,000
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	Buah	354	639,104,800	538,486,652	22,421,275	0	560,907,927	78,196,873
3.06.01	ALAT STUDIO	Buah	7	35,131,000	18,008,600	3,313,600	0	21,022,200	14,108,800
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	Buah	3	25,345,000	25,345,000	0	0	25,345,000	0
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR	Buah	1	149,985,000	59,994,000	7,499,250	0	67,493,250	82,491,750
3.10.01	KOMPUTER UNIT	Buah	49	543,250,600	278,147,200	47,620,575	0	325,767,775	217,482,825
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	Buah	35	224,093,790	139,189,274	13,322,074	0	152,211,348	71,882,442
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN		10	6,278,310,000	298,466,968	76,880,076	0	375,347,344	5,902,962,956
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Unit	6	4,691,395,000	223,767,500	58,205,209	0	281,972,709	4,409,422,291
4.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Unit	3	1,371,092,000	63,771,720	15,942,930	0	79,714,650	1,291,377,350
4.04.01	TUGU/TANDA BATAS	Unit	1	215,823,000	10,927,748	2,731,937	0	13,659,685	202,163,315
134113	JARINGAN		1	19,988,100	1,998,808	249,851	0	2,248,659	17,739,441
5.04.02	JARINGAN LISTRIK		1	19,988,100	1,998,808	249,851	0	2,248,659	17,739,441
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN		5	120,263,000	56,726,456	870,364	0	57,596,820	62,666,190
3.05.01	ALAT KANTOR	Buah	1	24,975,000	24,975,000	0	0	24,975,000	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT	Buah	3	28,270,000	28,270,000	0	0	28,270,000	0
4.04.01	TUGU/TANDA BATAS	Unit	1	67,018,000	3,481,456	870,364	0	4,351,820	62,666,190
TOTAL				8,725,724,318	2,065,957,166	184,856,885	0	[illegible]	6,474,910,267

Watampone, 30 Juni 2020
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

H. Andi Fajar Siam Sawerigading, SE. M.Si
NIP. 19741214 200604 1 002

LAMPIRAN A.2

TABEL RINCIAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

TA. 2019

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2020

Tanggal : 13-09-2020
Halaman : 1
Kode Lap. : LBSKSSKS

NAMA UAKPB : 005.01.19.307509 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH SD 1 JANUARI 2020	PENAMBAHAN	KDP YG MENJADI ASET DEFINITIF	JUMLAH SD 30 JUNI 2020	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	
. . . .	TIDAK ADA DATA	0	0	0	0	
TOTAL		0	0	0	0	

Watampone, 30 Juni 2020
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

H. Andi Fajar Siam Sawerilonga, S.E., M.Si
NIP. 19741214 200604 1 002

LAMPIRAN A.3

HIBAH

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

LAPORAN BARANG HIBAH DK/TP
YANG TELAH DIUSULKAN PROSES HIBAH KEPADA PENGELOLA BARANG
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2020

Tanggal : 13-09-2020
Halaman : 1
Kode Lap. : LBMNHDKTPIS

NAMA UAKPB : 005.01.19.307509 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2020	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0	0	0	0	0	0	0	0
. . . .	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				0		0				0

Watampone, 30 Juni 2020
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

H. Andi Fajar Siam Sawerilongi, SE., M.Si
NIP. 19741214.200604.1.002